

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH DI KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Pasar Danau Panggang)

Rina Yanti¹, Ramona Handayani², Moh. Fajar Noorahman³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
E-mail: rinayanti76383@gmail.com

ABSTRAK

Pasar Danau Panggang merupakan salah satu pasar pemerintah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tepatnya berada di Kecamatan Danau Panggang. Penelitian ini dilatarbelakangi yaitu masih kurangnya informasi dari dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) UPT pasar terkait Peraturan Daerah No. 17 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menginterpretasikan Implementas Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian dekriptip kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengambil sampel secara Purposive Sampling data sebanyak 10 orang. Data di analisis dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi, dan mengadakan member check.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Kurang baik dilihat di indikator berikut yaitu indikator yang kurang terimplemetasi dengan baik; kejelasan standar, tujuan kebijakan, sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, pola-pola hubungan, kondisi sosial, dan tingkat komitmen. Indikator yang cukup baik; norma-norma dan kondisi ekonomi. Sedangkan indikator yang sudah baik; komunikasi dengan instansi lain, koordinasi dengan instansi lain, struktur birokrasi, kondisi politik, tanggapan pelaksana, dan pemahaman pelaksana. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara terbagi menjadi dua. Pertama, faktor pendorong yakni adanya koordinasi dengan instansi lain. Kedua, faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi terhadap pedagang maupun masyarakat mengenai Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan kurang maksimalnya para pelaksana serta fasilitas yang kurang memadai.

Agar Implementasi berjalan dengan baik, maka kepada Kepala UPT Pasar Kabupaten Hulu Sungai Utara hendaknya lebih memperhatikan sarana dan prasarana pada pasar Danau Panggang, juga rutin dan berkelanjutan dalam melakukan sosialisasi tentang Peraturan No. 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar informasi terkait perda dapat di terima secara utuh dan merata oleh pedagang.

Kata kunci: Implementasi, Pengelolaan Pasar

ABSTRACT

Panggang Lake Market is one of the government markets in Hulu Sungai Utara Regency, precisely in Danau Panggang District. This research is motivated by the lack of information from the market UPT service regarding Regional Regulation no. 17 of 2013 concerning Market Management of the North Hulu Sungai Regency Government. This research aims to determine, analyze and interpret the implementation of Regional Regulation no. 17 of 2013 concerning Government Market Management in Danau Panggang District, North Hulu Sungai Regency and the factors that influence it.

This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive research type. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. This research took samples using Purposive Sampling data of 10 people. Data was analyzed using data collection techniques, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data credibility tests include extending observations, increasing persistence, triangulation, and conducting member checks.

The results of this research indicate that the implementation of Regional Regulation no. 17 of 2013 concerning Management of Government Markets in Danau Panggang District, North Hulu Sungai Regency. Not well seen in the following indicators, namely indicators that are not implemented well; clarity of standards, policy objectives, human resources, infrastructure resources, relationship patterns, social conditions, and level of commitment. Quite good indicators; norms and economic conditions. While the indicators are good; communication with other agencies, coordination with other agencies, bureaucratic structure, political conditions, implementing responses, and implementing understanding. The factors that influence the implementation of Regulation no. 17 of 2013 concerning Government Market Management in Danau Panggang District, North Hulu Sungai Regency is divided into two. First, the driving factor is coordination with other agencies. Second, the inhibiting factor is the lack of outreach to traders and the public regarding Regional Regulation no. 17 of 2013 concerning Market Management of the North Hulu Sungai Regency Government and the lack of maximum implementation by implementers and inadequate facilities.

In order for the implementation to run well, the Head of the North Hulu Sungai Regency Market UPT should pay more attention to the facilities and infrastructure at the Panggang Lake market, as well as routinely and continuously carry out socialization regarding Regulation no. 17 of 2013 concerning Market Management of the North Hulu Sungai Regency Government so that information related to regional regulations can be received completely and evenly by traders.

Keywords: *Implementation, Market Management*

PENDAHULUAN

Pasar adalah tempat bertemunya kepentingan produsen dengan kepentingan konsumen yakni sebagai tempat strategis untuk pelaku bisnis (produsen) dan manfaat praktis bagi para konsumen. Pasar diklasifikasikan menjadi 2 yakni pasar tradisional dan pasar modern yang setiap pasar punya ketentuan tersendiri dalam melakukan transaksi. Pasar sebagai salah satu penggerak utama kegiatan ekonomi masyarakat, karena itu butuh penataan dan revitalisasi pasar, hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pasar Danau Panggang.

Berdasarkan hasil observasi penulis, ditemukan beberapa permasalahan pada Pasar Danau Panggang, yaitu :

1. Tidak tersedianya lahan parkir khusus yang luas dan memadai sehingga terjadi parkir liar dan

tidak adanya pos keamanan dan kantor pasar. Hal ini melanggar Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 13 Ayat (1) tentang Sarana Prasarana

2. Penjual masih banyak berjualan di bahu jalan sehingga mengganggu pengguna jalan lain. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 21 Ayat (1) tentang “mengatur penempatan barang agar tampak rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya”.
3. Kurangnya informasi dan sosialisasi Peraturan tersebut kepada masyarakat dan Pedagang sekitar.

Berdasarkan fenomena tersebut oleh karena itu, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH DI KECAMATAN DANAU PANGGANG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Pasar Danau Panggang)”**

Batasan penelitian ini menggunakan teori model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2020), ada 6 Variabel yang mempengaruhi kinerja Implementasi ini, yaitu:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas
4. Karakteristik Agen Pelaksana
5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik
6. Disposisi Implementor

Penelitian terdahulu Oleh (Hapizah, 2022) tentang **“Implementasi Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Alabio Kecamatan Sungai Pandan)”** Program Studi Administrasi Publik STIA Amuntai dan (Amelia, 2020) tentang **Implementasi Peraturan Daerah No 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Ikan Banua Lima)”** Program Studi Administrasi Publik STIA Amuntai menyatakan bahwa Implementasi Peraturan tersebut belum optimal dilakukan, dari berbagai indikator pernyataan seperti kejelasan standar, sumber daya manusia, sumber daya infrastruktur, kondisi sosial, dan pemahaman pelaksana karena situasi dan kondisi tiap pasar, dan faktor yang mempengaruhi adalah sarana prasarana kurang memadai.

Tinjauan teoritis dalam penelitian ini adalah Kebijakan Publik menurut Harrold Laswell dan Abraham Kaplan dalam (Subarsono, 2020) “Kebijakan Publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika social yang ada dalam masyarakat. Kebijakan Publik adalah program-program yang ditetapkan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik social di masyarakat sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari pengertian diatas, dapat ditemukan elemen yang terkandung dalam kebijakan public sebagaimana yang dikemukakan oleh Anderson (Sahya Angara, 2016:507) yaitu Kebijakan selalu punya tujuan tertentu, Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan yang benar – benar dilakukan oleh pemerintah, kebijakan bersifat positif dan negative antara tindakan dan keputusan pemerintah, serta Kebijakan public yang positif selalu berdaarkan pada peraturan perundang – undangan yang bersifat memaksa. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik adalah program – program yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan masyarakat sejahtera yang tidak bertentangan dengan nilai – nilai praktek sosial masyarakat hingga kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Implementasi Kebijakan Publik menurut Daniel A. Mazmanian dan Sabatier dalam (Agustino, 2019) “Implementasi Kebijakan

adalah pelaksana keputusan kebijakan dasar, bisa berbentuk undang-undang ataupun berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang mana keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, dan menurut pandangan Van Meter dan Van Horn dalam (Mulyadi, 2016) mengatakan bahwa “Implementasi merupakan tindakan individu, pejabat, kelompok bahan pemerintah atau swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan dari keputusan tersebut. Kemudian tahapan proses pembuatan kebijakan menurut (Winarno, 2014) merupakan “Proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus di kaji sehingga proses penyusunan kebijakannya dimasukkan dalam beberapa tahap untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan tersebut. Selanjutnya menurut (Daft, 2011) tentang pengelolaan adalah “Pengelolaan biasanya dilakukan setelah perencanaan dan mencerminkan bagaimana organisasi mewujudkan rencana tersebut yang mana mencakup penentuan dan pengelompokan tugas, mendelegasikan otoritas, serta mengalokasikan sumber daya yang ada dalam organisasi. Terakhir yaitu Pasar, yang mana menurut (Noor, 2015) dimana konsep dan pengertian pasarnya dapat dilihat dari arti luas dan sempit, yaitu “Arti sempit, pasar adalah tempat berkumpul dan bertemunya penjual dan pembeli di lokasi tertentu”, sedangkan arti luas “Pasar adalah mekanisme bertemunya kepentingan konsumen dan produsen, yang mana menjadi sumber informasi bagi pelaku ekonomi dan sarana meningkatkan kepuasan konsumen atau produsen”.

METODE

Lokasi penelitian bertempat di Pasar Danau Panggang yang terletak di Jl. Alabio – Danau Panggang, Desa Pandamaan, Kec. Danau Panggang, Kab. HSU dengan 10 Informan wawancara yang terdiri dari Kabid dan staff Perdagangan Disperindag HSU, Kepala Desa Pandamaan, pedagang dan pembeli di Pasar Alabio tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif yang mana bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi seperti yang dikemukakan oleh (Gunawan, 2015). dengan tipe penelitian diskriptif yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, dan juga observasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif - kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian yang di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, analisis dokumen, observasi dan dokumentasi baik foto ataupun video.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak dan setelah proses pengumpulan data dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Menurut (Sugiyono, 2016) analisis data merupakan “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkan tiap unit serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri ataupun orang lain”. Kemudian menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) dalam mengolah data kualitatif perlu melalui beberapa tahap yaitu: Reduksi atau penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dilanjutkan dengan uji kredibilitas data untuk menghasilkan data dan hasil yang valid, dan menurut Sugiyono ada beberapa cara pengujian kredibilitas data terhadap hasil

penelitian, yaitu: Perpanjangan Pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi/pengecekan data dari berbagai sumber, analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check* kepada pemberi data.

Adapun data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer atau data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari Informan, dan data sekunder atau data pendukung yang bisa di dapatkan dari buku atau dokumen lain yang berhubungan dengan Implementasi pengelolaan pasar, dengan sumber data yang dipilih secara *Purposive Sampling* atau pemilihan informan dengan kualifikasi tertentu yang lebih kompeten dan memahami di bidangnya.

PEMBAHASAN

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2020) dimana ada 6 variabel untuk mengukur keberhasilan suatu Implementasi, yakni Standar dan Sasaran Kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi social, ekonomi & politik, serta disposisi Implementor. Dengan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

a. Kejelasan standar

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Standar kebijakan masih kurang efektif karena kurangnya sarana prasarana sehingga peraturan tersebut tidak terimplementasi sebagaimana peraturan yang berlaku.

b. Tujuan kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan dari peraturan tersebut sudah efektif karena tujuan tersebut dapat mengatur semua aspek pengelolaan pasar di Kab. HSU walaupun dalam prakteknya di Pasar Danau Panggang belum sepenuhnya terlaksana.

2. Sumber Daya

a. Sumber daya manusia

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia masih kurang efektif karena belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, terlebih dari petugas lapangan yang belum maksimal dalam melakukan penjagaan di lokasi pasar baik untuk sarana prasarana ataupun keamanan dan kenyamanannya, dan dari pihak dinas terkait pun kurang dalam melakukan pengawasan terhadap petugas – petugas tersebut.

b. Sumber daya infrastuktur

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya infrastuktur penunjang Implementasi pengelolaan pasar pemerintah di pasar Danau Panggang masih belum memadai karena beberapa sarana prasarana penunjang tidak tersedia, seperti lahan parkir, pos keamanan, wc umum, dll, pendapat tersebut bertentangan dengan pendapat Dinas terkait bahwa sarana prasarana yang diberikan sudah cukup untuk menunjang para pedagang dan pembeli.

c. Sumber daya finansial

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial yang baik dan memadai dari hasil pajak tertibusi pasar sudah cukup baik karena pengelolaan yang baik oleh Pemerintah dan Dinas terkait untuk mendukung kesejahteraan

masyarakat dan menambah pendapatan daerah tersebut.

3. Komunikasi antar Organisasi, dan Penguatan Aktivitas

a. Komunikasi dengan Instansi Lain

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Komunikasi dengan Instansi lain sudah efektif karena terjalannya komunikasi dan kerjasama yang baik sehingga mudah dalam mengimplementasikan Perda tersebut.

b. Koordinasi dengan Instansi Lain

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Koordinasi dengan instansi lain sudah efektif karena setiap instansi yang terlibat menjalankan tugasnya dengan baik, dan hanya perlu pengawasan lebih dari pihak Dinas terkait

4. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Struktur Birokrasi sudah efektif karena sudah berjalan sesuai SOP yang berlaku baik untuk sistem administrasi ataupun tugas lapangan.

b. Norma – norma

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Norma – norma sudah cukup efektif karena dapat diterapkan oleh pihak pengelola dan pedagang sesuai SOP tapi tetap fleksibel untuk kondisi dan situasi tertentu.

c. Pola Hubungan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi mengenai Pola Hubungan masih belum efektif karena pihak pengelola kurang dalam kerjasama mensosialisasikan peraturan tersebut.

5. Kondisi Social, Ekonomi dan Politik

a. Kondisi Sosial

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi tentang kondisi social masih kurang efektif karena kondisi social masyarakat yang berbeda – beda tiap daerah sehingga ada beberapa daerah yang tidak mendukung untuk mengimplementasikan semua Perda tersebut.

b. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi masih kurang efektif dalam mendukung Implementasi Perda tersebut karena harus terus berkreasi mengikuti perkembangan dan persaingan pasar yang signifikan.

c. Kondisi Politik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Kondisi Politik sudah efektif karena proses Implementasi tidak terpengaruh oleh politik pemerintah dan tetap mengacu pada Undang – undang perdagangan yang berlaku.

6. Disposisi Implementor

a. Tanggapan Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Tanggapan Pelaksana terhadap Perda tersebut sudah efektif karena sudah direspon dengan baik oleh pengelola, tinggal penerapan di lapangan saja lebih diperhatikan dan dilibatkan pihak masyarakat dalam pengambilan keputusan.

b. Pemahaman Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pelaksana sudah efektif karena petugas memahami apa isi kebijakan dari Perda tersebut, tinggal mensosialisasikan kepada para pedagang agar mereka mengetahui dan memahami mengenai isi Perda tersebut.

c. Tingkat Komitmen Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Tingkat komitmen pelaksana masih kurang efektif karena peraturan tersebut belum bisa dijalankan secara optimal oleh kedua pihak dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pengelola kepada pihak pedagang, mereka hanya mengetahui sedikit dari aturan Perda tersebut.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Danau Panggang (Studi kasus Pasar Danau Panggang) menurut teori Van Meter dan Van Horn dalam (Subarsono, 2020) meliputi :

1. Faktor pendukung

a. Adanya Koordinasi dengan Instansi lain

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa salah satu keberhasilan faktor pendukung Implementasi kebijakan adalah Kerjasama yang baik antar pihak pengelola dengan pedagang yang di dapatkan dengan komunikasi yang baik kantar kedua nya.

b. Sumber daya finansial yang memadai

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial yang memadai berasal dari pengelolaan yang baik oleh pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan daerah tersebut.

c. Komunikasi dengan Instansi lain

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang baik antara kedua belah pihak baik pengelola ataupun pedagang menjadi salah satu kunci agar implementasi kebijakan dapat berjalan baik.

d. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa salah satu keberhasilan faktor pendukung implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi yang berjalan baik sesuai hak dan kewenangannya agar implementasi kebijakan dapat dijalankan dengan baik.

e. Norma – norma

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa salah satu keberhasilan faktor pendukung implementasi kebijakan adalah norma – norma yang dijalankan dengan baik dalam koordinasi untuk pengambilan keputusan.

f. Kondisi Politik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa salah satu keberhasilan faktor pendukung implementasi kebijakan adalah kondisi politik yang berjalan dengan baik karena tidak ada campur tangan politik dalam proses pembuatan serta pengimplementasian kebijakan sesuai perda yang berlaku.

g. Pemahaman Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa salah satu keberhasilan faktor pendukung implementasi kebijakan adalah pemahaman oleh para pelaksana kebijakan hingga kebijakan dapat dijalankan dengan baik.

2. Faktor Penghambat

a. Kejelasan Standar

- Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan adalah Standar dan Sasaran Kebijakan yang belum sesuai dengan ketentuan sehingga proses implementasi terhambat dan tidak dapat berjalan dengan lancar.
- b. Tujuan Kebijakan
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan adalah tujuan kebijakan yang belum terlaksana dengan baik seperti sarana dan prasarana yang kurang memadai serta pelanggaran dari para pedagang.
- c. SDM yang kurang
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia yang kurang mencukupi dari segi kualitas dan kuantitasnya untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik.
- d. Sumber Daya Infrastruktur yang kurang
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan adalah sumber daya infrastruktur yang kurang memadai untuk menunjang proses implementasi kebijakan secara maksimal.
- e. Pola Hubungan
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan adalah pola hubungan antar pelaksana yang kurang bekerjasama dengan baik dalam menginformasikan dan mensosialisasikan tentang perda tersebut sehingga ada Sebagian masyarakat atau pedagang yang tidak mengetahui aturan yang berlaku.
- f. Kondisi Sosial masyarakat yang kurang memahami tentang Perda
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan adalah kondisi sosial masyarakat yang kurang efektif untuk proses pengimplementasian kebijakan karena mereka kurang memahami tentang perda tersebut.
- g. Kondisi Ekonomi pengurangan penjualan pedagang
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan adalah kondisi ekonomi masyarakat yang menurun karena makin ketat nya persaingan antara pedagang pasar dan penjual online, yang mana kebanyakan pembeli lebih senang membeli online karena harga lebih murah dan tidak perlu meluangkan waktu untuk datang langsung ke pasar, sehingga hal tersebut menjadi salah satu penghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
- h. Tingkat komitmen pelaksana yang kurang sosialisasi tentang Perda
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa Salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan adalah kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang dan kurangnya ketegasan dalam mengatur ketertiban pasar sehingga menimbulkan berbagai masalah, salah satunya kemacetan karena pedagang lebih memilih berdagang dibahu jalan daripada di loss yang sdh disediakan pengelola.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi tentang Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Pasar Danau Panggang) maka didapat kesimpulan sebagai berikut, yaitu :

Indikator yang masih kurang efektif adalah indikator yang menyangkut tentang pemenuhan

kebutuhan pedagang baik dalam segi administrasi, informasi ataupun sarana prasarana penunjang, yaitu sebagai berikut :

1. Kejelasan standar
2. Tujuan kebijakan,
3. Sumber daya manusia yang yang belum optimal dalam bekerja,
4. Sumber daya infrastruktur yang belum memadai,
5. Kondisi sosial masyarakat dalam menyikapi peraturan yang berlaku,
6. Kondisi ekonomi masyarakat yang menurun karena persaingan pasar,
7. Dan komitmen pihak pelaksana dalam mensosialisasikan peraturan tersebut.

Sedangkan indikator yang sudah efektif adalah indikator yang menyangkut antara dinas terkait dengan pihak pengelola dimana mereka tau dan memahami sepenuhnya isi dari Peraturan Daerah tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Sumber daya finansial,
2. Komunikasi dengan instansi lain,
3. Koordinasi dengan instansi lain,
4. Struktur birokrasi,
5. Norma – norma,
6. Kondisi politik ,
7. Pemahaman pelaksana.

Saran untuk Dinas terkait agar lebih memperhatikan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah tersebut oleh para petugas di lapangan dengan melakukan pengawasan dan evaluasi bertahap agar mengetahui titik masalah dan solusi penanganannya. Dan untuk para pedagang agar lebih aktif dalam mencari informasi dan menyuarakan hak jika memang hak tersebut tidak diberikan oleh pihak pengelola pasar tersebut sedangkan para pedagang sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2019). *Dasar - dasar Kebijakan Publik*.

Amelia, R. (2020). *Implementasi Peraturan Daerah Kab. HSU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pasar Ikan Banua Lima)*.

Affrian, R. (2024) 'Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) 'Evaluation of PT Adaro Indonesia's Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ahdiat, R. and Afrilla, P.N.A.N. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KABUT ASAP DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2518–2529.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

- Anjasmari, N.M.M. and Hasna, N.O. (2023) 'EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(10), pp. 4457–4465.
- Arlan, A.S. (2024) 'Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan', *Administratus*, 8(2), pp. 56–68.
- Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) 'IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.
- Riadi, S., Ahdiat, R. and Hidayatullah, G.M. (2023) 'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STUDI KASUS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN PADA PASAR INDUK AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al'iidara Balad*, 5(1), pp. 25–30.
- Saputra, T. *et al.* (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Urahmah, N. and Isma, I. (2023) 'IMPLEMENTASI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 1 TAHUN 1974 PASAL 7 AYAT (1) BATAS USIA PERKAWINAN: STUDI KASUS DI DESA PASAR SENIN DAN DESA RANTAWAN, KECAMATAN AMUNTAI TENGAH, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5494–5500.
- Urahmah, N., Ulfah, R. and Riyanor, R. (2022) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN STOP BUANG AIR BESAR (BABS) DI KECAMATAN BANJANG (STUDI KASUS DESA KALINTAMUI, KALUDAN BESAR, PALANJUNGAN SARI)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), pp. 849–855.
- Daft, R. L. (2011). *Era Baru Manajemen*.
- Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*.
- Hapizah, N. (2022). *Implementasi Perda No 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Kab. HSU (Studi Kasus Pasar Alabio Kec. Sungai Pandan)*.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*.
- Noor, H. F. (2015). *Ekonomi Publik, Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat*.
- Subarsono. (2020). *Ananlisis Kebijakan Publik*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi*.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*.